

AS & NUKLIR IRAN

Aco Manafe



Di tengah merebaknya isu nuklir Iran dan sorotan dunia internasional yang meningkat terhadap Teheran, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke negeri Persia produsen minyak keempat terbesar dunia. Selama dua hari (10-11 Maret 2008) di Iran beliau menemui Presiden Mahmoud Ahmadinejad dan Pemimpin Tertinggi Pengawal Revolusi Iran Ayatollah Ali Khomeini. Ketiganya merundingkan berbagai hal menyangkut hubungan bilateral serta isu-isu Timur Tengah dan global lainnya.

Mungkin muncul pendapat dan anggapan, mengapa Presiden RI berkunjung ke Iran di tengah meningkatnya sorotan bahkan kritik dan sanksi DK PBB atas Teheran. Anggapan yang membenarkan maupun menyorot atau mengkritik kunjungan tersebut adalah fenomena politik yang wajar. Apalagi dunia internasional khususnya Amerika Serikat dan Blok Barat tentu bertanya-tanya, atau malahan tidak senang bahkan menentang kunjungan itu.

Inti kunjungan Presiden RI tersebut mencakup beberapa prinsip. *Pertama*, kunjungan kenegaraan 10-11 Maret 2008 tersebut, sebagai kunjungan balasan ter-

hadap kunjungan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad ke Jakarta pada Mei 2006. Ini tata krama diplomatik yang berlaku universal untuk menata dan mengemban hubungan bilateral antar-negara. Setiap kunjungan negara sahabat patut dibalas oleh kepala negara atau pemimpin pemerintahan negara yang dikunjungi.

Kedua, kunjungan balasan atau kunjungan kenegaraan intinya suatu kewajiban, karena RI menganut politik bebas aktif. Artinya kepada negara manapun tanpa mengacu kepada ideologi atau prinsip politik negara bersangkutan, RI wajib dan berhak berkunjung, untuk menjalin serta mempertahankan, memperkuat bahkan meningkatkan hubungan bilateral dan hubungan persahabatan.

Ketiga, bahkan kunjungan itu lebih terfokus, dalam mewujudkan kerjasama kedua negara dalam politik, ekonomi, serta sosial budaya yang dikuatkan dengan kesepakatan kerjasama, melalui nota kesepahaman bersama-MoU-Memorandum of Understanding, dalam bidang energi, teknologi, pendidikan, dan beberapa sektor lainnya.

Kalangan pengamat politik ekonomi,

dan publik dunia juga bisa bertanya apakah kunjungan Presiden RI itu tidak mengganggu hubungan AS-RI? Atau mengusik hubungan RI dengan beberapa negara Barat (Uni Eropa) yang ikut menentang program nuklir Iran.

RI Abstain

Bukan hanya AS dan mitra-mitranya Uni Eropa yang menjatuhkan sanksi politik dan ekonomi terhadap Iran. Ke-14 negara anggota Dewan Keamanan PBB khususnya enam besar yaitu: AS, Rusia, Cina, Inggris, Jerman dan Prancis pun menyepakati sanksi ketiga terhadap Iran tertanggal 4 Maret 2008, karena Iran dianggap tidak terbuka tentang program nuklirnya, bahkan meneruskan pengayaan uranium yang bisa mengarah ke pembuatan bom atom.

Hanya Indonesia yang kebetulan menjabat Presiden DK-PBB memberikan sikap abstain-alias tidak memberikan suaranya (setuju ataupun tidak setuju). Padahal dalam penjatuhan sanksi pertama dan kedua melalui Resolusi 1740 Indonesia bersama 14 anggota DK PBB mendukung penuh sanksi tersebut. Pada sanksi ketiga melalui

Resolusi 1803, terdapat ketentuan yang membatasi kegiatan beberapa pejabat tinggi Iran, seperti larangan bepergian, serta ketentuan melarang dua bank Iran, untuk tidak melakukan transaksi dengan dunia luar. Dua bank Iran: Bank Melli dan Saderat dicurigai mendukung dana untuk pembelian bahan-bahan yang diperlukan Iran untuk membangun pusat nuklirnya di Natanz dan Busher. Sanksi juga menetapkan larangan mengangkut barang bagi perusahaan penerbangan dan pelayaran Iran.

Sanksi yang berlangsung selama 15 bulan (hingga 4 Juni 2009) bertujuan untuk menekan secara politik dan ekonomi Iran sehingga melemah dan bisa menghentikan program nuklirnya. Indonesia seperti diutarakan Kepala Perwakilan Tetap Indonesia di PBB Marty Natalegawa abstain, dengan pertimbangan bahwa penerapan sanksi ketiga ini belum tentu bermanfaat. Sebab bisa saja sanksi tersebut justru menghasilkan hal-hal yang kontraproduktif, misalnya bisa memperburuk hubungan Iran dengan dunia, khususnya hubungan bilateral RI- Republik Islam Iran.

Dampak negatif secara *defacto*, tidak sepenuhnya bisa terpenuhi, karena

posisi ekonomi Iran sebagai penghasil minyak utama dunia, cukup kuat. Hubungan-hubungan kerja sama politik-ekonominya dengan adidaya Rusia, Cina dan negara-negara lainnya, khususnya Timur Tengah, tentu tidak akan menggoyahkan perkembangan ekonomi domestiknya. Yang dirasakan akibat sanksi tersebut, tentu berupa tekanan politik yang menyangkut harga diri dan popularitas negara Persia itu.

Pengayaan Uranium

Program nuklir Iran dicurigai AS, karena disertai pengayaan uranium dan plutonium yang bisa digunakan untuk memproduksi senjata dan bom nuklir. Banyak pendapat yang tidak mengacu kepada penjatuhan sanksi terhadap Teheran.

Memang Washington cenderung mencurigai rezim Iran yang dianggap konservatif dan ekstrim, sehingga memprediksi bahwa program nuklir Iran bukanlah proyek nuklir biasa untuk kepentingan sipil, tetapi proyek nuklir militer yang bertujuan memproduksi dan hulu ledak nuklir.

Padahal reaktor nuklir di Busher dan

Natanz dibantu penuh oleh Rusia, yang nota bene menyepakati tiga sanksi DK-PBB terhadap Iran. Rusia misalnya setelah tertunda beberapa lama, baru saja (awal 2008) mendrop 80 ton uranium untuk kepentingan program nuklir Iran. Rusia sebagai pembantu proyek nuklir Iran tentu merasa wajib dan berhak untuk memasok uranium tersebut. Itulah kontroversinya.

Di satu sisi, Rusia ikut menandatangani atau menyetujui pemberian sanksi politik dan ekonomi terhadap Iran, namun di sisi lain Rusia membantu teknologi dan finansial untuk pembangunan reaktor nuklir Iran. Hubungan Rusia-Iran khususnya bantuan teknologi Rusia untuk reaktor nuklir Iran, tampak pada kunjungan Presiden Putin ke Teheran Oktober 2007.

Sesungguhnya penolakan Amerika khususnya Presiden Bush terhadap program nuklir Iran bukan baru sekarang. Bush pada pertengahan Desember 2007 seperti dikutip media-media terkemuka dunia mengatakan, "Bila Rusia berkeinginan menyuplai uranium seperti yang saya tahu dan mendukung, mestinya orang Iran tak perlu mempelajari bagaimana memperkaya uranium."

Kasus Reaktor Osirak

Jika mengacu pada pengalaman pembangunan reaktor nuklir Osirak di Irak tahun 1977 yang dibiayai Prancis juga bertujuan damai. Namun hasil penyelidikan intelijen di masa Presiden Ronald Reagan, mengisyaratkan bahwa ternyata Reaktor Osirak juga memperkaya uranium. Penelitian intelijen AS itu diperdalam oleh militer Israel, yang mencurigai bahwa Reaktor Nuklir Osirak bisa digunakan Saddam Hussein untuk memproduksi senjata nuklir menghancurkan Israel. Data intelijen yang dicari oleh AS maupun Israel itu, kemudian diklarifikasi oleh Washington.

Maka pada 7 Juni 1981, tanpa ragu Israel mengerahkan satu skadron jet tempur F-16 yang terbang rendah, dan menghancurkan fasilitas nuklir Irak. Mengenai program reaktor Busher Iran, bukan hal baru dipersoalkan pemerintahan Presiden Bush. Sejak Presiden Clinton berkuasa pun, masalah nuklir Iran sudah dipersoalkan. Rezim Presiden Clinton pada awal dekade 1990an, sudah menentang prakarsa Rusia untuk membantu pembangunan reaktor nuklir Iran tersebut. Pemerintahan Clinton ma-

lahan membujuk Moskow untuk membatalkan rencananya.

Perbedaan proyek nuklir Irak di Osirak dengan program reaktor Busher adalah, Osirak dapat menggunakan pengayaan uranium untuk memproduksi bom atom, sementara menurut Henri Sokolski Kepala *Non-proliferation Policy Education Center* di Washington, proyek nuklir Busher, hanya merupakan reaktor nuklir air ringan yang membuat pembiakan-proliferasi.

50 Bom Nuklir

Namun Sokolski malahan mengatakan bahwa dalam tingkat operasi yang normal reaktor-reaktor air ringan yang besar seperti di Busher, bisa memproduksi 330 kg uranium, yang mendekati level senjata plutonium. Volume tersebut cukup untuk memproduksi lebih dari 50 bom nuklir.

Labih jauh ahli ini mengatakan proses untuk memisahkan plutonium dari uranium menggunakan teknologi yang sedikit lebih mutakhir dari teknologi membuat susu atau mengecor beton. Proses ini tidak akan terpantau kamera Badan Tenaga Atom Inter-

nasional (IAEA) yang mirip dengan kemampuan kasat mata manusia. Para petinggi Iran telah menolak berbagai praduga tersebut, dan menegaskan Iran akan menghentikan proses pengayaan uraniumnya, meskipun telah terkena tiga resolusi Dewan Keamanan PBB.

Pada Desember 2007 badan intelijen AS-*National Intelligence Estimate* mengklaim bahwa Iran menghentikan program senjata nuklirnya sejak tahun 2003. Dan selama 18 tahun Iran mendasari pembangunan reaktor nuklirnya berdasarkan aturan main IAEA, namun masih belum menghapuskan semua fasilitasnya yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan reaktor sipil.

Sesungguhnya ketika Israel mengebom Reaktor Osirak-Irak bukan suatu kebetulan, karena Tel Aviv cemas bila terlambat menghancurkannya, Reaktor Osirak akan menimbulkan ancaman nuklir yang pasti menghancurkan segalanya, terutama penyebaran radioaktif.

Kini sejumlah orang Israel mengkhawatirkan tentang program nuklir Iran yang bisa menyebabkan ancaman nyata, walaupun bisa diredakan oleh

NIE-Lembaga Estimasi Intelijen Nasional.

Di antara berbagai risiko yang diasumsikan NIE meyakinkan para penentu kebijakan Israel, bahwa dunia termasuk Amerika Serikat, tidak akan bertindak agresif. AS juga takkan segera menekankan sanksi termasuk embargo gas impor dari Iran. Kesimpulannya, -mereka akan mengajak Iran menghentikan program pengayaan uraniumnya. Apa yang akan dilakukan Tel Aviv? Apakah suatu tindakan militer, yang tampaknya sudah menjadi pertimbangan yang direncanakan?

Pentagon Tolak Serangan

Menghangatnya isu nuklir Busher, (juga Natanz dan Arak) serta "perse-tujuan diam-diam Presiden Bush terhadap pasokan uranium Rusia", bisa meningkatkan kecemasan dunia. Dalam konteks serangan militer bekas Sekjen PBB Kofi Annan mengingatkan, bahwa suatu aksi militer terhadap fasilitas nuklir Iran justru akan menimbulkan bencana. Dia menga-takan hal itu agar AS maupun DK-PBB, lebih mengutamakan dialog dalam menyelesaikan isu nuklir Iran.

Di Washington sendiri setelah Men-han Donald Rumsfeld diberhentikan, Presiden Bush mendatangi markas besar Pentagon untuk meminta pen-dapat para Kastaf Angkatan Bersen-jata Amerika Serikat tentang ke-mungkinan melakukan aksi militer terhadap Iran. Presiden Bush diyakinkan bahwa serangan bom mam-pu menghancurkan semua fasilitas nuklir Iran dan militer negeri terse-but. Namun para petinggi militer AS menolak serangan militer, karena bisa menjadi bumerang. Teheran bisa menutup aliran minyak melalui Se-lat Hormoz. Pada gilirannya akan menyebabkan krisis pasokan energi serta kemunduran ekonomi regional dan global. Bahkan kondisi chaos ini bisa dimanfaatkan para teroris untuk menyerang aset-aset Amerika.

Memang ada masukan data menge-nai Iran melalui lembaga NIE ke masyarakat intelijen. Seorang pejabat tinggi intelijen AS yang menolak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa laporan akurat mengenai nuklir Iran sudah disiapkan dengan perhi-tungan-perhitungan yang moderat, bahwa Iran telah menghentikan pro-gram pengayaan uraniumnya.

Disadari bahwa informasi tidak me-

nyimpulkan tentang nuklir Iran dan cara mengatasinya secara tuntas. Apa yang dirumuskan tak jauh berbeda dengan berbagai masukan yang diperoleh IAEA. Yakni program pengayaan uranium Iran cukup memprihatinkan, serta skeptis terhadap upaya Pemerintah Teheran untuk tidak mengubahnya menjadi bom nuklir. Namun berdasarkan Pakta Nuklir IAEA *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT), setiap negara memiliki hak untuk memperkaya uranium untuk tujuan-tujuan damai. Sekalipun demikian setiap negara nuklir, harus bersikap terbuka disertai supervisi internasional.

Iran dengan sendirinya terkena aturan main IAEA. Dan amat memprihatinkan, karena tim pemeriksa lembaga atom PBB itu berhasil menemukan sebagian proyek pengayaan uranium yang disembunyikan. Maka itu diduga kuat bahwa ada proyek pengayaan uranium untuk memproses pembuatan bom nuklir secara rahasia, seperti pernah dilakukannya hingga tahun 2003.

Meskipun sudah ada perhitungan intelijen bahwa program nuklir Iran sudah dihentikan sejak 2003, namun program nuklir Iran tetap memusing-

kan dunia internasional khususnya PBB. Masalahnya, karena memang pengayaan uranium menuju pembuatan bom nuklir, adalah bagian yang tersulit.

Selama ini Presiden Iran dan para diplomatnya selalu mengklaim program pengayaan uraniumnya bertujuan damai, tetapi dengan cadangan minyaknya yang begitu besar (2,5 juta barel/hari), membuat masyarakat dunia menjadi ragu. Artinya mengapa membangun reaktor nuklir, padahal pasokan energi minyak melimpah (2,3 juta barel/hari).

Perolehan informasi resmi pun cukup sulit. Antara lain karena struktur pemerintahannya yang tidak tunggal. Ada Presiden Ahmadinejad, namun dipercaya bahwa pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khomeini lebih berkuasa sebagai THE SUPREME LEADER. Ada eksekutif yang dipimpin presiden. Dan ada pula Pengawal Revolusi yang cenderung lebih berkuasa dari angkatan bersenjata.

“The Persia House”

Seorang diplomat senior AS pernah mengutarakan, bahwa Amerika Seri-

kat tidak begitu mengetahui perkembangan yang sebenarnya di Iran, khususnya di dalam birokrasi pemerintahan Teheran. Diakui sejak tahun terakhir terdapat perubahan yang signifikan dalam tubuh pemerintahan Iran. Kelompok analisis Badan Intelijen AS-CIA, yakni *The Persia House* badan baru yang terpisah dari lembaga intelijen regional Timur Tengah sedang berupaya merekrut "orang-orangnya" di Iran. Metoda baru ini diharapkan dapat memberikan informasi tangan pertama. Bahkan informasi terakhir dipercaya datangnya dari seorang jenderal Pengawal Revolusi Iran. Jenderal Ali Reza Asghari yang telah membelot ke Turki pada Februari 2008. Namun para petinggi CIA menginginkan informasi yang lebih beragam dan komprehensif.

Pada bulan Agustus 2007 Direktur Intelijen Nasional AS McConnell memerintahkan Direktur CIA Michael Hayden untuk menyiapkan perhitungan dan analisis baru berdasarkan informasi terkini tentang nuklir Iran. Hayden membentuk tim kontraintelijen yang baru dengan asumsi tidak akan terkecoh oleh disinformasi yang datang dari Iran. Washington terus giat dan pada Oktober 2007, tim baru CIA dan Ba-

dan Intelijen Nasional berhasil merumuskan semua informasi yang masuk. Hayden dan deputinya Steve Kamps konon menemukan isyarat kemungkinan disinformasi logis bisa terjadi, meskipun hal itu belum terjadi.

Belum Memulai Lagi

Dengan meneliti dan menganalisis semua data dan informasi, maka dua dari 16 badan intelijen tak termasuk CIA menyimpang dari kesimpulan final tertinggi, bahwa Iran telah menghentikan program pengayaan uraniumnya sejak tahun 2003. Maka terdapat kesepakatan umum menyimpulkan Iran sebenarnya belum memulai lagi program pengayaan uraniumnya. Konklusi NIE ini diputuskan pada Selasa 27 November 2007. Demikian ulasan Joe Klein yang tersebar luas di media terkemuka AS. Direktur *National Intelligence Estimate* Michael Hayden bersama seorang analis senior masalah Iran memaparkan analisis mereka kepada Presiden Bush pada besoknya Rabu 28 November 2007. Presiden AS berupaya untuk menenangkan diri dalam menanggapi laporan intelijen NIE tersebut.

Seorang staf Badan Keamanan Nasional AS di masa Presiden Clinton, yakni Kenneth Pollack mengatakan, dengan menerima laporan berharga tersebut, maka Presiden AS bisa mengatakan kepada Iran, "Dokumen ini menunjukkan bahwa Amerika tidak akan melaksanakan serangan militer." Penulis *The Persian Puzzle* itu menambahkan, "Namun kami dan dunia amat prihatin atas program pengayaan uranium, jadi marilah kita duduk bersama untuk merundingkannya!"

Sebelum penjatuhan sanksi ketiga, sudah beredar luas rumor bahwa kemungkinan Amerika akan menyerang fasilitas nuklir Iran. Dugaan adanya niat serangan adalah akibat sejumlah pernyataan Presiden Bush yang mendesak seorang perwira tingginya untuk mengumumkan bahwa sebenarnya tidak ada rencana penyerangan tersebut. Pada tanggal 12 November 2007 misalnya Panglima Pusat Komando AS di Pentagon Admiral William Fallon (yang bertugas melaksanakan penyerangan andaikan ada perintah eksekusi dari Presiden Bush), membantah isu tersebut.

Kepada media *Financial Times* Panglima AS itu berkata: "Sungguh me-

ngejutkan, bahwa begitu banyak ahli dan pengamat yang mengulas kemungkinan rencana penyerangan tersebut!"

Pada akhir November 2007 Kepala Badan Tenaga Atom Internasional PBB (IAEA) Mohammad El Baradei diminta melaporkan, apakah Iran sungguh telah menuruti saran IAEA untuk lebih banyak menginfomasikan tentang bantahan dan pernyataan Teheran, bahwa program nuklirnya memang bertujuan damai.

Namun kesabaran Barat dan AS tidak lama, karena sadar, bahwa mereka sebenarnya mengharapkan sesuatu yang tidak disukai untuk dilaporkan oleh Teheran. Maka Uni Eropa dan AS segera mendorong DK-PBB untuk menerapkan sanksi berikutnya kepada Iran.

Dalam kisah lain yang diajukan oleh kolumnis Joe Klein Desember 2007, melukiskan Presiden AS sebagai pribadi yang cemas, ketika menerima laporan NIE-*National Intelligence Estimate*. Lembaga Estimasi Intelijen Nasional AS yang menkoordinasikan 16 badan intelijen federal itu telah berupaya mengabaikan provokasi Presiden Bush. NIE yang tugasnya

melakukan penyidikan dan pemantauan atas setiap perkembangan situasi, telah menerbitkan laporan serius yang sesungguhnya mengabaikan retorika Bush yang provokatif terhadap Iran.

Laporan intelijen NIE itu mempersoalkan pernyataan Bush tertanggal 17 Oktober 2007, "Bahwa program pembuatan bom nuklir Iran bisa menjadi pemicu awal timbulnya Perang Dunia Ketiga".

NIE menganggap pernyataan ini berlebihan, dan amat ganjil. Bush mengatakan dia pertama mendengar hal itu pada Agustus 2007, yakni bahwa suatu analisis baru intelijen mengenai program bom nuklir Iran mendekati kenyataan. Namun ini juga bagian dari proses yang berjalan tanpa memenuhi prosedur. Mestinya melalui para penasihatnya, Presiden AS mengadakan pendekatan untuk mengecek akurasi laporan itu. Joe Klein mengatakan, nyatanya Presiden AS tidak berupaya mendekati atau menanyai Direktur Intelijen Nasional Mike McConnell yang seharusnya dilakukan.

Oleh karena itu Senator Joe Bidden menimpali, bila ini terjadi – maka

ini adalah sikap dan preseden yang tidak kompeten, dalam sejarah politik Amerika.

Bagaimanapun ini adalah suatu fenomena historis. Seharusnya, misalnya para petinggi intelijen saat makan pagi di Gedung Putih membisikkan sesuatu kepada Presiden. Dan nanti karena ada jaminan UU Kebebasan Akses Informasi di AS, maka hal tersebut bisa terungkap. Namun yang sudah terjadi, amat mungkin, melanjutkan, serta merupakan tindakan yang kurang tepat dalam komunitas intelijen. Tampaknya pemerintah kehilangan kontrol mengenai kerahasiaannya sendiri. Demikian pernyataan Senator Joe Bidden yang kemudian dikutip oleh kolonis terkemuka AS Joe Klein dalam artikelnya 17 Desember 2007.

Tanggapan Gedung Putih

Beberapa rincian tanggapan Gedung Putih atas kasus nuklir Iran, yang menurut beberapa pengamat Amerika cukup keras dan geram: Pada tanggal 28 Januari 2002 muncul terminologi Presiden Bush mengenai Poros Kejahatan-*Axes of Evil* yang ditujukan kepada Irak, Korea Utara dan

Iran. Pernyataan ini logis karena baru lima bulan berselang setelah serangan teroris terhadap Menara Ganda di New York (11 September 2001). Amerika Serikat dan Pemerintahan Bush masih amat trauma terhadap serangan yang menewaskan lebih dari 2.000 orang sekaligus.

Sebagian kalimat yang mengacu kepada Iran adalah pernyataan Presiden Bush dalam pidato tahunannya yang menekankan usaha AS untuk mencegah kaum teroris menggunakan senjata pemusnah massal.

“Iran secara agresif memiliki senjata pemusnah massal bahkan mengekspor teroris. Negara-negara seperti ini bersama aliansi terorisnya, membentuk “poros kejahatan”, dipersenjatai untuk mengancam perdamaian dunia”. Pada November 2004 Menlu Colin Powell mengklaim laporan intelijen yang mengisyaratkan Iran mengembangkan teknologi rudal yang mampu memiliki hulu ledak nuklir.

“Tak ada keraguan dalam benak saya dan amat jelas apa yang kita peroleh dan bicarakan bertahun-tahun, bahwa mereka berminat dalam persenjataan nuklir yang memiliki kemudahan, yang bisa diteruskan (kepada

pihak lain).” Pada 18 Desember 2005, setelah tidak ditemukan senjata pemusnah massal di Irak, Wapres Dick Cheney mengatakan: “Ada banyak alasan untuk mempercayai, bahwa mereka (Iran) memang benar berminat terhadap senjata nuklir. Bukan hanya kita yang yakin akan hal ini, tetapi nyatanya negara-negara Eropa juga menyadarinya!”

Pada 17 Oktober 2007 dalam konferensi pers untuk memperingatkan fraksi Demokrat di Kongres AS, Presiden Bush memperingatkan hal serupa.

“Kita tahu pemimpin di Iran yang menyatakan bahwa dia ingin menghancurkan Israel. Maka oleh karena itu saya ingin mengatakan jika Anda ingin menghindari Perang Dunia III, maka Anda harus berupaya mencegah mereka (Iran) memiliki teknologi untuk membuat senjata nuklir.”

Pada 4 Desember 2007, Presiden AS (setelah NIE menemukan bukti Iran telah menghentikan sementara program nuklirnya sejak 2003), mengatakan:

“Saya menilai laporan ini sebagai isyarat bahwa mereka (Iran) memiliki program nuklir. Mereka meng-

hentikannya, berarti mereka juga bisa memulainya kembali!"

Presiden Ahmadinejad seperti disebutkan di atas, dengan yakin menyatakan memiliki senjata nuklir adalah hak dan kehormatan bangsanya. Negara lain seperti India, Cina, Israel, Rusia bisa memiliki nuklir, maka mengapa Iran harus dikecam?

Inilah perang kata-kata atau polemik yang berkepanjangan, yang akhirnya mendorong DK-PBB untuk ketiga kalinya menjatuhkan sanksi kepada Iran. Alasannya sebenarnya, karena laporan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menyatakan Iran belum seluruhnya melaporkan secara rinci program reaktor nuklirnya khususnya pengayaan uranium baik di Natanz, Busher maupun Arak, yang menurut kajian bisa digunakan untuk membuat bom dan hulu ledak nuklir. Kasus nuklir Iran mungkin

karena beda pendapat, dan ketidakcocokan politik AS-Iran sejak penahanan para diplomat AS di Kedubes AS Teheran pada tahun 1979. Upaya diplomasi yang tangguh dan konsisten akan menjembatani kembali hubungan kedua pihak. Atau menanti Pemilu Iran tahun 2009 yang mungkin menghasilkan pemerintahan baru yang berminat membangun kembali hubungan diplomatik Iran-AS. Betapapun stabilitas politik di Timur Tengah dan Persia perlu, selain penyelesaian masalah Irak dan Palestina. Peran RI dengan politik bebas aktifnya pun bisa digunakan, dengan diplomasi aktif untuk meredam krisis nuklir Iran. Ini langkah lanjut sikap abstain Indonesia di DK-PBB, 4 Maret 2008. Toh kini Indonesia bisa menyiapkan konferensi perdamaian Timur Tengah di Jakarta, dengan mengundang negara-negara Arab dan anggota OKI. Tetapi mengapa tidak untuk Iran dan AS? □